PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jl.Madukoro Blok AA/BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 7608201
Faksimile 024-7612334 Laman:http//wwwjatengprov.go.id
Surat Elektronik : dpusdataru@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 027 / 9230 / 2019
TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 027/79/2019 TANGGAL 2 JANUARI 2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN / PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG / JASA DILINGKUNGAN KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

a. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 824.3/05383/2019 Tanggal 14 Juni 2019 tentang Pemindahan PNS atas nama M.Sidiq Nugraha, ST NIP.19710207 199403 1 002 ke Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah.

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dananya dari APBD Provinsi Jawa Tengah khususnya pengadaan barang / jasa yang efisien, efektif, terbuka, transparan dan akuntabel perlu didukung oleh organisasi pengadaan yang keanggotannya terdiri dari orang-orang yang kredibel dan kompeten.

c. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang / jasa sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu menunjuk orang-orang yang mempunyai keahlian dan kapasitas untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa dilingkungan kantor Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c, maka perlu merubah lampiran keputusan Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Pengadaan Barang / Jasa Dilingkungan Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah ;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 10 Tahun 1950 tentang Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92).

2. Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 54 Tambahan Lembaran Negara No. 3833).

3. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244)

4. *Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan* Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi.

5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95).

6. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Standart dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah No.027/79/2019 tanggal 2 Januari 2019 dan menunjuk Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Dilingkungan Kantor Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah yang keanggotaanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA meliputi :

a. PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b. PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

KETIGA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dalam menjalankan tugas pokok dan wewenang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 1 Juli 2019.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah

SR. EKO YUNIANTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Panitia bersangkutan.

Perubahan sk pphp2019

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas PU SDA TARU Prov. Jateng
Nomor : 027/9230/2019
Tanggal : 1 Juli 2019

PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN / PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG / JASA
DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH

PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN

No	Nama dan NIP		Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
	Semula	Menjadi			
1	Maryanto NIP. 19640310 198803 1 001	Maryanto NIP. 19640310 198803 1 001	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Sekretariat	- Semua paket pekerjaan APBD (untuk Pengadaan Barang)
2	Andi Hamudi NIP. 19770605 200911 1 001	Andi Hamudi NIP. 19770605 200911 1 001	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Bidang IAB	- Semua paket pekerjaan APBD (untuk Pemeliharaan Barang)
3	M.Sidiq Nugraha, ST NIP.19710207 199403 1 002	Yudi Iskandar, ST.MT NIP. 19830227 201001 1 015	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Bidang IAB	- Semua paket pekerjaan APBD (Untuk Pekerjaan Konstruksi)
4	Basuki. ST NIP.19790530 201402 1 001	Basuki. ST NIP.19790530 201402 1 001	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Bidang PPT	- Semua paket pekerjaan APBD (Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi)

PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA LAINNYA

No	Nama dan NIP		Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
	Semula	Menjadi			
1	Maryanto NIP. 19640310 198803 1 001	Maryanto NIP. 19640310 198803 1 001	Ketua	Sekretariat	- Semua paket pekerjaan APBD - Untuk pengadaan > Rp. 200 jt
2	Andi Hamudi, ST NIP.19770605 200911 1 001	Andi Hamudi, ST NIP.19770605 200911 1 001	Sekretaris	Bidang IAB	
3	Imam Fuadi, ST NIP.19770301 201001 1 002	Imam Fuadi, ST NIP.19770301 201001 1 002	Anggota	Sekretariat	

PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI

No	Nama dan NIP		Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
	Semula	Menjadi			
1	Nur Hidayat, ST.MT NIP.19761026 200501 1 008	Yudi Iskandar, ST.MT NIP. 19830227 201001 1 015	Ketua	Bidang IAB	- Semua paket pekerjaan APBD - Untuk Pekerjaan Konstruksi > Rp. 200 jt
2	M.Sidiq Nugraha, ST NIP.19710207 199403 1 002	Hery Nugraha H. ST.MT. NIP.19731203 200501 1 010	Sekretaris	Bidang PPT	
3	Hery Nugraha H. ST.MT. NIP.19731203 200501 1 010	Dian Wahyu Jatmiko, ST.MT NIP. 19820216 201101 1 007	Anggota	Bidang SBP	

PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN JASA KONSULTANSI

No	Nama dan NIP		Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
	Semula	Menjadi			
1	Imam Shuyuti AK. ST NIP.19820410 201001 1 010	Imam Shuyuti AK. ST NIP.19820410 201001 1 010	Ketua	Bidang PPT	- Semua paket pekerjaan APBD - Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi > Rp. 200 jt
2	Basuki. ST NIP.19790530 201402 1 001	Basuki. ST NIP.19790530 201402 1 001	Sekretaris	Bidang PPT	
3	Ganjar Primandaru, ST NIP. 19861007 200903 1 004	Theresia Novie Harjanti, ST.MT NIP. 19771114 200903 2 003	Anggota	Bidang PPT	

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah

SR. EKO YUNIANTO